

BAB I

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Dalam kompleksitas dinamika kehidupan bangsa dimasa yang akan datang, kita dituntut untuk mempersiapkan seluruh komponen bangsa agar memiliki kesadaran dan tanggung jawab untuk mengatasi permasalahan dan menghadapi berbagai tantangan yang timbul. Institusi Pemerintah sebagai salah satu komponen sistem penyelenggaraan Negara memiliki posisi penting dalam mewujudkan aparat pemerintah yang bersih dan berwibawa melalui peningkatan kinerja.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai salah satu unsur pemerintah menghadapi permasalahan dan tantangan yang sama dimasa yang akan datang. Oleh sebab itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu melakukan refleksi dan proyeksi agar bisa mendominasi fungsi dan mengoptimalkan peran serta kontribusinya bagi pembangunan Bangsa baik jangka pendek maupun yang fundamental dan berjangka panjang.

Laporan ini dimaksudkan sebagai informasi penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai Keterangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang memuat tentang Arah Kebijakan Umum, Pengelolaan Keuangan, Penyelenggaraan tugas umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024.

1.1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 5657)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan dan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan secara teknis diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008;
11. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Administrasi Kependudukan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rancangan Pembangunan Jangka menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 04 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

1.2. DATA UMUM DAERAH

1.2.1. Data Geografis Wilayah

Kabupaten Lampung Barat memiliki luas wilayah lebih kurang 3.368.14 km² setelah terjadi pemekaran Kabupaten Pesisir Barat atau 10,6% dari luas wilayah Provinsi Lampung dan mempunyai garis pantai sepanjang 260 km. Lampung Barat terletak pada koordinat 4°, 47',16"-5°, 56', 42" lintang selatan dan 103°, 35', 08" - 104°, 33', 51" bujur timur

Adapun batas wilayah Kabupaten Lampung Barat berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Kab. Ogan Komering Ulu Selatan (Provinsi Sumatra Selatan)
- Sebelah Selatan : Kab. Pesisir Barat dan Kab. Tanggamus
- Sebelah Barat : Ka. Pesisir Barat
- Sebelah Timur : Kab. Lampung Utara, Kab. Way Kanan, dan Kab. Tanggamus

1.2.2. Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk Kabupaten Lampung Barat berdasarkan Data DKB (Data Konsolidasi Bersih) Semester 1 tahun 2025, yang dikeluarkan Oleh Direktorat Jendral Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia adalah :

Tabel I
Data Penduduk Kabupaten Lampung Barat
Berdasarkan Data DKB Semester I Tahun 2025
Dirjen Adminduk Kementerian Dalam Negeri

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk		
		Lk	Pr	Jumlah
1	Balik Bukit	22.655	21.439	44.094
2	Sumber Jaya	12.639	11.806	24.445
3	Belalau	6.587	6.125	12.712
4	Way Tenong	18.091	17.365	35.456
5	Sekincau	10.110	9.378	19.488
6	Suoh	9.940	9.026	18.966
7	Batu Brak	8.086	7.522	15.608
8	Sukau	13.630	12.750	26.380
9	Gedung Surian	8.954	8.429	17.383
10	Kebun Tebu	11.037	10.590	21.627
11	Air Hitam	6.590	5.986	12.576
12	Pagar Dewa	9.157	8.088	17.245
13	Batu Ketulis	7.292	6.625	13.917
14	Lumbok Seminung	4.825	4.249	9.074
15	Bandar Negeri Suoh	13.859	12.363	26.222
	Jumlah	163.452	151.741	315.193

*Sumber data : Data Konsolidasi Bersih (DKB) semester I Tahun 2025 Dirjen dukcapil
Kementerian Dalam Negeri*

BAB II

PENJABARAN APBD

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat merupakan salah satu lembaga teknis lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang tidak melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pengelolaan pendapatan, pengelolaan belanja, dan pengelolaan pembiayaan, oleh karena itu pengelolaan anggaran yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan penganggaran untuk kegiatan belanja dengan komponen belanja berupa Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa dan Belanja modal.

Adapun pengelolaan anggaran tersebut dipergunakan untuk berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat dalam upaya mencapai sasaran-sasaran dalam rencana kerja tahun 2024 tidak terlepas dari bagaimana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat merealisasikan atau menggunakan secara tepat dan efektif anggaran yang dialokasikan pada masing-masing sasaran program kegiatan.

Program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat dapat terlaksana karena adanya dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan 5 (lima) Program dan 16 (sebelas) kegiatan, dan 41 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar **Rp.** Rp. 4.804.029.879,- (*empat milyar delapan ratus empat juta dua puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah*) dan terealisasi sebesar 96,95% atau sebesar **Rp.** Rp. 4.657.527.214,-, (*empat milyar enam ratus lima puluh tujuh lima ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus empat belas rupiah*) dengan rincian per program kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025

No	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Jumlah Pagu DPA Murni	Jumlah Pagu DPA Perubahan	Realisasi	
				Rp	%
1	2	3	4	5	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.503.882.846	3,781,697,779	3,673.588.780	97,14
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38.811.000	27,272,000	26,434,000	96,93
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.085.756.596	3,021,277,579	2,939.910.484	97,31
	Kegiatan Administrasi Barang milik daerah pada Perangkat Daerah	7.185.000	1,310,000	1,310,000	100
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	28.852.000	22,248,000	19,348,000	86,97
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	121.155.400	107,245,400	105,530,753	98,40
	Kegiatan Pengadaan Barang milik daerah penunjang	407.847.100	406,847,100	403,924,092	99,28
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	89.978.400	78,901,400	64,606,041	81,88
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	142.144.450	91,690,300	89,710,328	97,84
2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	472.692.000	361,603,900	354,554,683	98,05
	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	472.692.000	361,603,900	354,554,683	98,05
3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	80.295.000	80,295,000	79,842,000	99,44
	Pelayanan Pencatatan Sipil	62.662.000	31,366,000	31,048,000	98,99
	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	22.509.000	10,377,000	10,367,000	100
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	50.960.000	38,552,000	38,427,000	99,68
4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	612.160.000	570,644,200	539,752,751	94,59
	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	573.688.000	552,301,000	521,491,551	94,42
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	15.755.000	7,875,000	7,875,000	100
	Pembinaan dan PengawasanPengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	22.717.000	10,468,200	10,386,200	99,22

5	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	25.371.900	9,789,000	9,789,000	100
	Penyusunan Profil Kependudukan	25.371.900	9,789,000	9,789,000	100
	Jumlah	5.168.084.846	4.804.029.879	4.657.527.214	96,95

Sumber data : Laporan Realisasi Anggaran Dinas Dukcapil Tahun 2025

Alokasi anggaran belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat pada Tahun Anggaran sebesar Rp. 4.804.029.879,- (*empat milyar depalan ratus empat juta dua puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah*) dan terealisasi sebesar 96,95% atau sebesar Rp. Rp. 4.657.527.214,- , (*empat milyar enam ratus lima puluh tujuh lima ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus empat belas rupiah*) dengan komponen anggaran belanja terdiri atas Belanja Pegawai sebesar Rp. 3.018.569.579,- terealisasi sebesar Rp. 2.937.202.484,- atau sebesar 97,30 % dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 1.374.344.700,- terealisasi sebesar 1.312.230.588,- atau sebesar 95,48% serta Belanja Modal sebesar Rp. 411.115.600,- terealisasi sebesar 408.094.142,- atau sebesar 99,27% atau dapat dilihat dari tabel berikut :



BAB III

PENYELENGGARAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

3.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan

1. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.
- Dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan 5 Program diantaranya :
- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota
 - 2. Program Pendaftaran Penduduk
 - 3. Program Pencatatan Sipil
 - 4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - 5. Program Penyusunan Profil Kependudukan

Adapun capaian Kinerja Program dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Realisasi Program
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025

No	Nama Program	Indikator Program	Target	Realisasi
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80	81,10
2	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	90,20%	113,18
3	Program Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan akta kelahiran	99%	99,97%

4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase kenaikan jumlah kerjasama pemanfaatan data kependudukan	80%	80%
5	Program Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase profil kependudukan Kabupaten Lampung Barat	100%	100%

- 2. Capaian kinerja keluaran masing masing kegiatan pada setiap urusan sesuai dengan target dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya.
Pada Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam hal menjalankan program, kegiatan dan sub kegiatan capaian kinerjanya baik yaitu mencapai 100%
- 3. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat dituangkan dalam tabel sebagai berikut :

3.1.1 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar									
No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai sakip Perangkat Daerah : 80	Nilai sakip Perangkat Daerah : 81,10			
				Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 11 dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 11 dokumen			
					Jumlah dokumen penganggaran daerah yang di susun 5 dokumen	Jumlah dokumen penganggaran daerah yang di susun 5 dokumen			
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun 12 laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun 12 laporan			
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang di susun 11 dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang di susun 11 dokumen			
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun 1 dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun 1 dokumen			
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun 1 dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun 1 dokumen			
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang di susun 1 dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang di susun 1 dokumen			
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang di susun 1 dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang di susun 1 dokumen			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 dokumen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 dokumen			
				Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen Evaluasi perangkat daerah yang disusun 12 dokumen	Jumlah dokumen Evaluasi perangkat daerah yang disusun 12 dokumen			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangannya 30 ASN	Jumlah ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangannya 30 ASN			
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang disusun 1 dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang disusun 1 dokumen			
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 2 laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 2 laporan			
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 2 dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 2 dokumen			
				Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangannya 30 ASN	Jumlah ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangannya 30 ASN			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang disusun 1 laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang disusun 1 laporan			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 2 laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 2 laporan			
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 2 dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 2 dokumen			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Administrasi Barang milik daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik SKPD 1 dokumen	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik SKPD 1 dokumen			
				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik SKPD 1 dokumen	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik SKPD 1 dokumen			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 dokumen	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 dokumen			
				Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 dokumen	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 dokumen			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang di sediakan 1 paket	Jumlah Paket Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang di sediakan 1 paket			
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang di sediakan 1 paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang di sediakan 1 paket			
					Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang di sediakan 4 dokumen	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang di sediakan 4 dokumen			
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu 1 laporan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu 1 laporan			
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 laporan			
				Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang di sediakan 1 paket	Jumlah Paket Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang di sediakan 1 paket			
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang di sediakan 1 paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang di sediakan 1 paket			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang di sediakan 4 dokumen	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang di sediakan 4 dokumen			
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 laporan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 laporan			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 laporan			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diadakan 27 unit	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diadakan 26 unit			
				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 8 unit	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 8 unit			
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 19 unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 18 unit			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 laporan			
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 laporan			
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 laporan			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 laporan			
				Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 laporan			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 laporan			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara 8 unit	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara 8 unit			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 unit			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 3 unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 3 unit			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau BangunanLainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 unit	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 unit			
				PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk 90,20%	Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk 113,18%			
				Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk 1 dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk 1 dokumen			
					Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk 1 laporan	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk 1 laporan			
					Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan 2 laporan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan 2 laporan			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk 1 dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk 1 dokumen			
				Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk 1 laporan	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk 1 laporan			
				Penerbitan Dokumen atas hasil pelaporan peristiwa kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan 2 laporan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan 2 laporan			
				PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran 99%	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran 99,93%			
				Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan sipil	Jumlah Laporan Hasil bimbingan Teknis terkait Pencatatan sipil 1 laporan	Jumlah Laporan Hasil bimbingan Teknis terkait Pencatatan sipil 1 laporan			
				Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil bimbingan Teknis terkait Pencatatan sipil 1 laporan	Jumlah Laporan Hasil bimbingan Teknis terkait Pencatatan sipil 1 laporan			
				PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase kenaikan jumlah pemanfaatan data kependudukan 80%	Persentase kenaikan jumlah pemanfaatan data kependudukan 80%			
				Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan 1 dokumen	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan 1 dokumen			
				Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan 1 dokumen	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan 1 dokumen			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 dokumen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 dokumen			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan 1 laporan	Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan 1 laporan			
				Penyajian Data Kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan	Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan 1 laporan	Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan 1 laporan			
				Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 1 laporan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 1 laporan			
				Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 1 laporan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 1 laporan			
				PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Data Perkembangan Kependudukan yang sesuai dengan hasil konsolidasi kemendagri 100%	Persentase Data Perkembangan Kependudukan yang sesuai dengan hasil konsolidasi kemendagri 100%			
				Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain 1 dokumen	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain 1 dokumen			
				Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain 1 dokumen	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain 1 dokumen			

3.2. KEBIJAKAN STRATEGIS

Tidak ada kebijakan yang diambil dalam menyelesaikan masalah yang diambil oleh Kepala Daerah melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat, dikarenakan tidak terdapat masalah dalam upaya pencapaian target.

**3.3. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN
SEBELUMNYA**

Tidak ada Tindak lanjut rekomendasi DRPR tahun 2025 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

BAB IV

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat tidak melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan Tugas Pembantuan, sebelum tahun 2022 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat terdapat dana DAK non Fisik Administrasi Kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri, tetapi pada tahun 2022 dan sampai saat ini tidak terdapat lagi dana tersebut.

BAB V

PENUTUP

Demikianlah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 telah berhasil disusun. Berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat dalam upaya mencapai sasaran-sasaran dalam rencana kinerja tahun 2025 tidak terlepas dari bagaimana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat merealisasikan atau menggunakan secara tepat dan efektif anggaran yang dialokasikan pada masing-masing sasaran program kegiatan.

Pada Tahun Anggaran 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat melaksanakan melaksanakan 5 (lima) Program, 16 (enam belas) kegiatan, dan 41 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar **Rp. Rp. 4.804.029.879,-** (*empat milyar delapan ratus empat juta dua puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah*) dan terealisasi sebesar 96,95% atau sebesar **Rp. Rp. 4.657.527.214,-**, (*empat milyar enam ratus lima puluh tujuh lima ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus empat belas rupiah*). Namun demikian tidak menutup kemungkinan masih ditemukan adanya kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini merupakan Laporan Capaian Kinerja APBD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat atas pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun Anggaran 2025.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025 ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban sekaligus sebagai evaluasi pelaksanaan APBD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini diharapkan dapat

digunakan sebagai acuan untuk meningkatkan kinerja pada waktu yang akan datang dan perbaikan langkah-langkah pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan dalam tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pengelolaan keuangan daerah.

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,



RUSPAN ANWAR, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19661220 199303 1 007